

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

LMek

TRIWULAN I
2020



PERSONIL
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2020

Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Lahir di D.I YOGYAKARTA pada tanggal 10 September 1963. Pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Meneruskan Pendidikan S2 Jurusan Teknik Perkeretaapian di Institut Teknologi Bandung dan Menjabat Direktur Prasarana Transportasi Jalan sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan saat ini.



AHMADI ZB, ATD, SE, MM

Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan



Lahir di Demak, 13 Mei 1966. Menempuh Pendidikan D.IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan S1 Transportasi di STMT Trisakti kemudian S2 Manajemen di STMT Trisakti. Menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



MURYATI NINI UTAMI, SE, M.M

Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Magetan, 10 Juni 1966. Menempuh Pendidikan S1 Managemen Perusahaan di Universitas Islam Indonesia lalu melanjutkan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan saat ini.



HERMAN ARMANDA, SE., MT

Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



Lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1967. Menempuh Pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas AL-Azhar dan Meneruskan S2 Perencanaan Wilayah Tata dan Kota di Universitas Tarumanegara. Menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak 11 Agustus 2020 sampai dengan saat ini.

SUSANTY PERTIWI, S.S, M.Hum

Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Lahir di Kota Makassar pada tanggal 20 Juli 1974. Menempuh pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang lalu meneruskan Pendidikan S2 Jurusan Hukum di Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta dan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



SUDARMAJI, SAP.,MM

Kasubbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Lahir di Kota Jakarta Timur pada tanggal 14 Agustus 1972. Menempuh pendidikan D3 Manajemen Informatika di Universitas Gunadarma lalu meneruskan S1 Ilmu Administrasi Negara di STIAM I Jakarta lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen SDM di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta dan menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.



DODY ARIFianto, ST., MMTr.

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan

Lahir di Jayapura pada tanggal 03 Agustus 1982. Menempuh pendidikan D.III LLAJ di STTD Bekasi kemudian S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Budi Utomo lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.



CHANGE ACCELERATE QUALITY ENTREPRENEURSHIP PLEASURE



TEGUH ILMAN SANTOSO, Amd LLAJ., ST., M.Sc

Kasi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Pemalang pada tanggal 13 Maret 1982. Menempuh pendidikan D.III Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Budi Utomo Jakarta kemudian S2 Sistem dan Teknik Transportasi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan menjabat sebagai Kasi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



AYU NILAWATI AGUSTINA, SE., M.MTr

Kepala Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor



Lahir di Cilacap pada tanggal 29 Agustus 1973. Menempuh pendidikan S1 Management Pemasaran di STIM Jakarta lalu meneruskan Pendidikan S2 Management Transportasi di Universitas Veteran dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan saat ini.

ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE

Kasi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Lahir di Tegal pada tanggal 06 Juli 1974. Menempuh pendidikan D.III Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S1 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kasi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



DIANA SEPTI RAHAYU, SE, MT

Kasi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana



Lahir di Sidoarjo pada tanggal 03 September 1983. Menempuh pendidikan D.III LLASDP di STTD kemudian S1 Manajemen di STIE ANINDYAGUNA Semarang lalu meneruskan Pendidikan S2 Transportasi di Institut Teknologi Bandung dan menjabat sebagai Kasi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

RIZKI FAUZI RAHMAN, S.SiT, M.Si

Kasi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Lahir di Kota Palembang pada tanggal 27 Januari 1989. Menempuh pendidikan D.IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Langlang Buana Bandung dan menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I L M C K setiap tahun. Tulisan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana dalam laporan ini mencakup:

- a) Perencanaan dan perjanjian kerja, yang merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah;
- b) Akuntabilitas Kinerja, yang memuat pengukuran kinerja kegiatan tahun 2020.

Dengan selesainya Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Tahun 2020, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban atas berbagai pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah pada tahun-tahun mendatang serta sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Jakarta, 14 April 2020

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Muda, IV/d

NIP. 19630910 199203 1 003

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran.



1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana Transportasi Jalan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- c) penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasimoda, dan kepengusahaan prasarana;
- d) penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- e) penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan
- f) penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri atas:

1. Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Subbagian Tata Usaha.





Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

➤ **Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan**

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan; dan



- e) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan.

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. **Seksi Rancang Bangun Terminal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, rancang bangun terminal penumpang tipe A dan terminal barang, serta bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C.
- b. **Seksi Pengelolaan Terminal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi terminal penumpang tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal angkutan jalan.

➤ **Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor**

Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor,
- c. penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;



- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan.
- e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta.

Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri atas :

- a. **Seksi Rancang Bangun** Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, serta pembangunan unit penimbangan kendaraan bermotor.
- b. **Seksi Pengelolaan** Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia bidang penimbangan kendaraan bermotor.

➤ **Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda :**

Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pendukung dan integrasi moda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi,



serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda atas :

- a. **Seksi Fasilitas Pendukung** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas pendukung.
- b. **Seksi Integrasi Moda** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan integrasi moda.

➤ **Subdirektorat Kepengusahaan**

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepengusahaan prasarana transportasi jalan.



Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana terdiri atas:

- a. **Seksi Penyelenggaraan Kemitraan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, serta kerja sama kemitraan kepengusahaan prasarana transportasi jalan.
- b. **Seksi Pengawasan dan Evaluasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

➤ **Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

1.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan saat ini sumber daya manusia yang tersedia yaitu 27 orang PPNPN dan 51 orang ASN

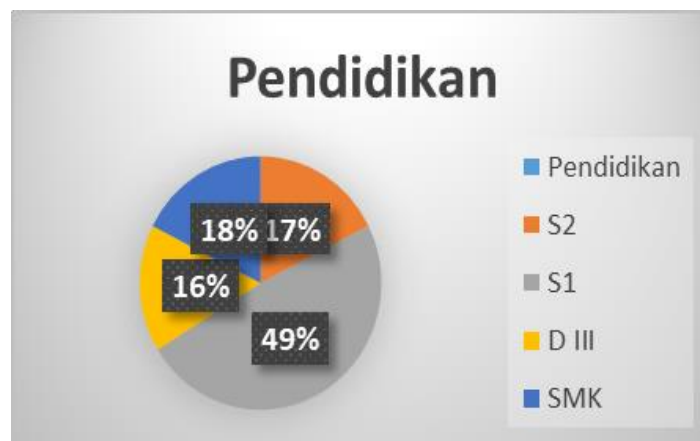


dengan total pegawai 78 orang. Jumlah Pegawai ASN Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dilihat pada tabel.

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berdasarkan klasifikasi pendidikan terakhir terlihat pada tabel sebagai berikut :

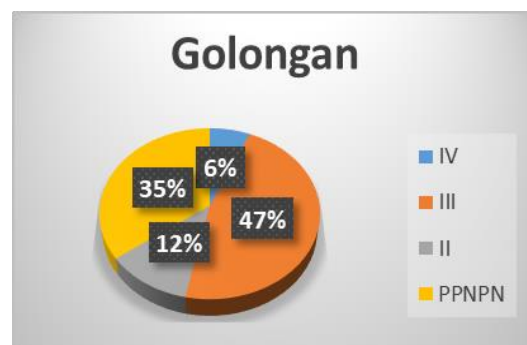
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

NO	URAIAN	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Direktur				1	
2	Subdit Terminal Angkutan Jalan	1	3	5	5	
3	Subdit Penimbangan Prasarana Kendaraan Bermotor	1	2	9	3	
4	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2	1	11	1	
5	Subdit Kepengusahaan Prasarana	2	3	4	3	
6	Subag Tata Usaha	7	3	7	1	



Gambar : Diagram Berdasarkan Golongan Pendidikan

No.	Golongan	2020
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	36
3.	Golongan II	9
4.	Golongan I	0
5.	Lainnya (PPNPN)	27
Jumlah		79



Tabel II.2. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	JenisKelamin	PNS	PPNP
1.	Perempuan	19	10
2.	Pria	32	17
Jumlah		51	27

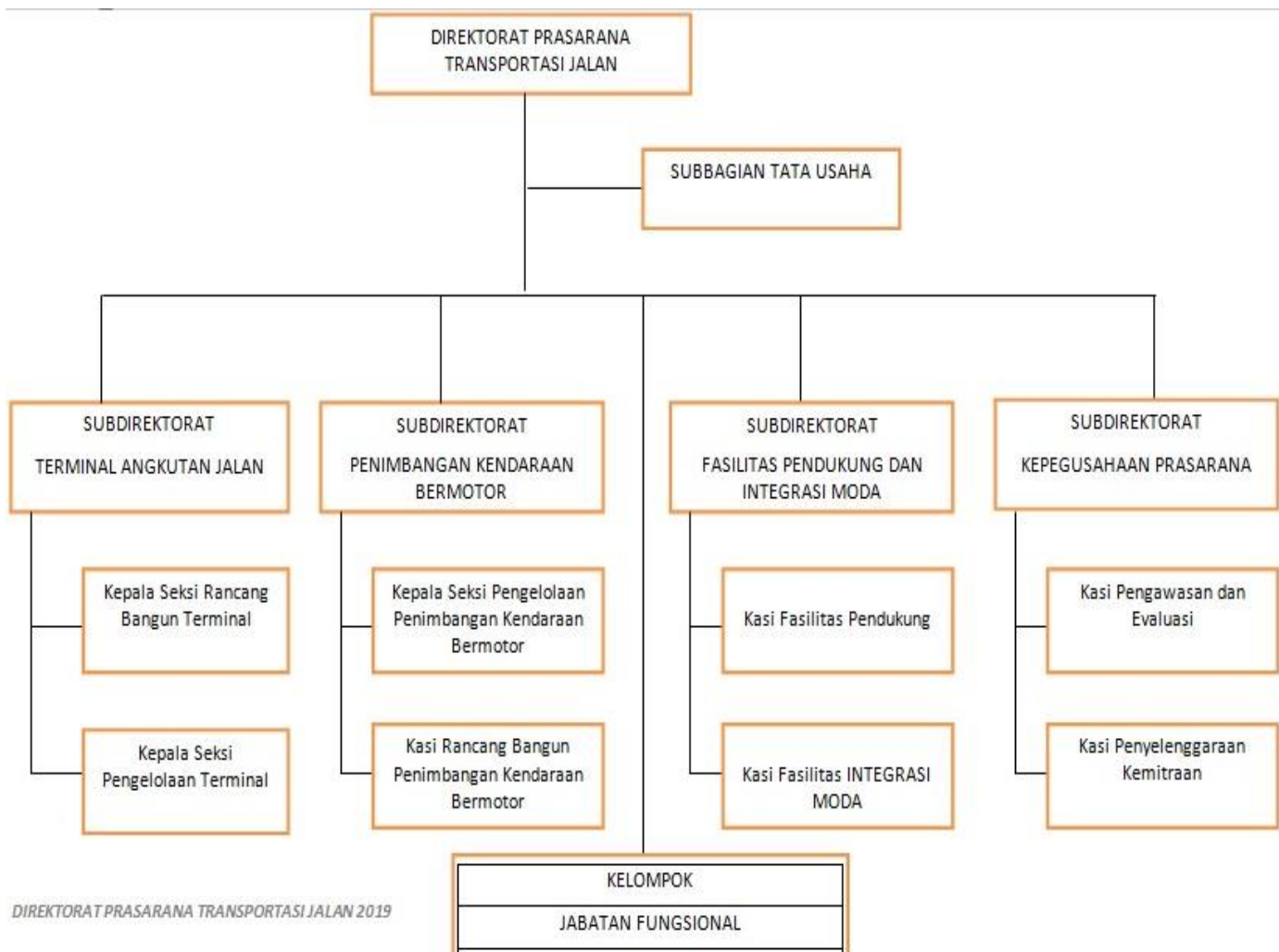
Tabel II.4. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselonering	2020
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	8
4.	Eselon V	-
Jumlah		14

Tabel II.5. Pegawai Berdasarkan Eselonering

Struktur Organisasi

Kerangka Kelembagaan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



1.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan Potensi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang Transportasi Jalan, Potensi pengembangan pada bidang Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan Transportasi Jalan akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi Transportasi Jalan akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur Transportasi Jalan. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan Transportasi Jalan akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan Transportasi Jalan berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan Transportasi Jalan yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada (Bapedal, Bapedalda atau lembaga teknis lainnya) baik di pusat maupun di daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pemantauan lingkungan.

1.4.1. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup)

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A

Sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dari 143 terminal penumpang tipe A yang wajib diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Pusat namun demikian sampai dengan posisi per Desember 2019 terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) terminal yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dan 46 (empat puluh enam) terminal yang belum dilaksanakan serah terima.

TERMINAL YANG SUDAH SELESAI BAST DI TAHUN 2020			
No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal
1	Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Terminal Batoh
2	Provinsi Banten	Kota Cilegon	Terminal Merak
3	Provinsi Banten	Kota Serang	Terminal Pakupatan
4	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Terminal Ciakar
5	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	Terminal Subang
6	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Mangkang
7	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Terminal Bawen
8	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Pemalang	Terminal Induk Pemalang
9	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Terminal Pekalongan
10	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	Terminal Tirtonadi
11	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	Terminal Ir. Soekarno
12	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Terminal Gunung Simping
13	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Terminal Purwokerto
14	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	Terminal Giri Adipura
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Terminal Arjosari
16	Provinsi NTB	Kota Mataram	Terminal Mandalika
17	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Terminal Batu Ampar
18	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	Terminal Sie Ambawang
19	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bitung	Terminal Tangkoko

TERMINAL YANG SUDAH SELESAI BAST DI TAHUN 2020

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal
1	Provinsi NAD	Kota Langsa	Terminal Langsa
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	Terminal Tanjung Pinggir
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	Terminal Simpang Aur
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	Terminal Payung Sekaki
5	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar	Terminal Bangkinang
6	Provinsi Riau	Kota Dumai	Terminal Dumai
7	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Karya Jaya
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Alang-Alang Lebar
9	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten OKI	Terminal Kayuagung
10	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	Terminal Rajabasa
11	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	Terminal Labuan
12	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	Terminal Lebak
13	Provinsi Banten	Kota Serang	Terminal Pakupatan
14	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	Terminal Kuningan
15	Provinsi Jawa Barat	Kota Cirebon	Terminal Harjamukti
16	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Terminal Indihiang
17	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Garut	Terminal Guntur Melati
18	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Terminal Cikampek
19	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	Terminal Dhaksinarga
20	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Mangkang
21	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	Terminal Tingkir
22	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	Terminal Kertonegoro
23	Provinsi Bali	Kabupaten Badung	Terminal Mengwi
24	Provinsi NTB	Kota Bima	Terminal Dara
25	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	Terminal Gambut Barakat
26	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Terminal W.A Gara
27	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Terminal Simbuang

REKAPITULASI TERMINAL TIPE A DALAM PROSES REGISTER

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA TERMINAL	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REGISTER
1	Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok	Terminal Bareh Solok	Proses Penyusunan BAST	Triwulan II Tahun 2020
2	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Karya Jaya	Proses Penandatanganan Perjanjian dan BAST Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan I Tahun 2020
3	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Alang-Alang Lebar	Proses Penandatanganan Perjanjian dan BAST Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan I Tahun 2020
4	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Terminal Cikampek	Proses Penandatanganan Perjanjian dan BAST Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan I Tahun 2020
5	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	Terminal Ir. Soekarno	Proses Penandatanganan Perjanjian dan BAST Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan II Tahun 2020
6	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Mangkang	Dalam Proses Pembahasan atas Perjanjian dan BAST yang sudah ditandatangani pada tahun 2016	Triwulan II Tahun 2020
7	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	Terminal Kebumen	Proses Inventarisasi Aset untuk memastikan Lampiran Bast sudah sesuai sebelum dilakukan penandatanganan	Triwulan II Tahun 2020
8	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	Terminal Tegal	Proses Persiapan Penandatanganan Perjanjian dan BAST yang akan diseremonialkan	Triwulan I Tahun 2020

REKAPITULASI TERMINAL TIPE A DALAM PROSES REGISTER

9	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Terminal Giwangan	Pemerintah Daerah Menyarankan untuk dilakukan pinjam pakai Aset Terminal Tipe A	Triwulan II Tahun 2020
10	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	Terminal Sei Ambawang	Proses Penandatanganan Perjanjian dan BAST Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan I Tahun 2020
11	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Terminal Simbuang	Proses Penandatanganan Perjanjian dan BAST Oleh Pemerintah Daerah	Triwulan II Tahun 2020

REKAPITULASI TERMINAL TIPE A YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH DITJEN HUBDAT

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Terminal Tetap dikelola Oleh Pemprov DKI Jakarta
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang		Terminal Tetap dikelola Oleh Pemprov DKI Jakarta
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres		Terminal Tetap dikelola Oleh Pemprov DKI Jakarta
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Barangnangsiang		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

REKAPITULASI TERMINAL TIPE A YANG TIDAK DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH DITJEN HUBDAT					
No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan	Tindak Lanjut
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
6	Provinsi Jawa Barat	Kab Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
9	Provinsi Banten	Kota Tangsel	Terminal Pondok Cabe		Terminal Tipe A diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 853 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia, terminal penumpang tipe A di atas telah ditetapkan sebagai lokasi terminal penumpang tipe A.

- 1) Tingkat pelayanan jalan, yang menyangga di lingkungan terminal kurang memadai secara fisik jalan, tidak efektif dan efisien sehingga menghambat proses perpindahan moda angkutan penumpang.
- 2) Aksesibilitas, terminal dengan simpul-simpul pergerakan masyarakat kurang terpadu sehingga tidak jarang didapati keengganan masyarakat maupun angkutan umum masuk ke dalam terminal.
- 3) Keamanan lingkungan sebagian besar terminal selama ini kurang mendukung bagi keamanan para pengguna jasa terminal, hal ini ditandai dengan maraknya aksi kejahatan seperti halnya pencopetan, pemalakan, dan premanisme sehingga mempengaruhi terhadap antusias pengunjung/penumpang menggunakan jasa pelayanan terminal.
- 4) Kenyamanan terminal yang belum terpenuhi sesuai harapan masyarakat pengguna jasa terminal, tidak jarang ditemukan terminal yang kurang baik dalam mengelola kebersihan dan ketertiban wilayah kerja terminal serta tata letak/lay out terminal yang tidak menunjang bagi kenyamanan para calon penumpang.

- 5) Fasilitas penunjang terminal sering kali terabaikan beberapa terminal sudah ada yang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti halnya fasilitas sosial, ibadah dan komersial. Namun fasilitas tersebut rata-rata terbengkalai dan kumuh karena tidak maksimal dalam pemeliharaan dan perawatannya.
- 6) Manajemen pengelolaan terminal belum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Disamping itu kompetensi SDM pelaksana di lapangan belum sesuai kapasitasnya. Kegiatan perencanaan, pengembangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap arus kendaraan umum yang masuk, parkir dan keluar dari terminal tidak teratur sehingga kinerja pelayanan terminal tidak berjalan dengan baik.

Namun demikian tidak semua kondisi terminal tipe A memiliki permasalahan seperti halnya di atas, di beberapa Pemerintah Daerah ada pula yang telah berjalan relatif baik. Dari kondisi permasalahan tersebut di atas, dengan pemindahan kewenangan pengelolaan terminal tipe A kepada Pemerintah Pusat secara bersamaan pula permasalahan-permasalahan dimaksud menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah pusat untuk menyelesaikannya

1.4.2. Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sebagai tindak lanjut amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 141 UPPKB yang wajib diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian sampai dengan posisi 31 Desember 2016 hanya terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) UPPKB yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D), 4 (empat) UPPKB sisanya belum dilakukan serah terima dan 6 UPPKB tidak diserahkan, Adapun daftar rincian UPPKB sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

UPPKB YANG SUDAH DISERAHKAN KEPADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**REKAPITULASI UPPKB
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



141
UPPKB



134 104 SUDAH REGISTER
14 PROSES PERALIHAN ASET KE KEMENKEU
16 PROSES VERIFIKASI ASET

**SUDAH SERAH TERIMA
OPERASIONAL**

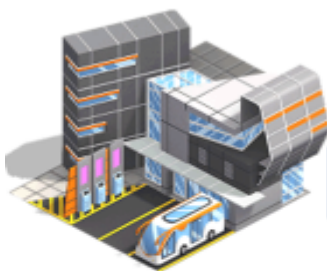


7 1 INVENTARISASI AWAL
6 TIDAK DISERAHKAN

**BELUM SERAH TERIMA
OPERASIONAL**

18

**REKAPITULASI UPPKB
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



134
UPPKB
(SUDAH BAST)



118 102 SUDAH REGISTER
16 PROSES PERALIHAN ASET KE KEMENKEU

PROSES INVENTARISASI AKHIR



16 16 VERIFIKASI ULANG

PROSES INVENTARISASI AWAL

19

REKAPITULASI UPPKB YANG SUDAH REGISTER

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA UPPKB	KETERANGAN	LUAS TANAH
1	Sumatera Utara	1	Kabupaten Dili Serdang	Tanjung Morawa I		
		2	Kabupaten Dili Serdang	Tanjung Morawa II		1.300
		3	Kabupaten Simalungun	Dolok Melangir		
		4	Kota Pematang Siantar	Simpang Dua		598
		5	Kabupaten Serdang Begadai	Simpang Runding		1.200
		6	Kabupaten Dili Serdang	Sibolangit	Beroperasi	
		7	Kabupaten Langkat	Gebang		
		8	Kabupaten Batu Bara	Dolok Estate	Beroperasi	
		9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Mambang Muda	Beroperasi	
		10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Aek Batu	Beroperasi	
		11	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Sabungan		
		12	Kabupaten Tapanuli Selatan	PAL XI		2.400
2	Lampung	13	Kabupaten Mandailing Natal	Jembatan Merah	Beroperasi	1.800
		1	Kabupaten Lampung Selatan	Way Urang	Beroperasi	19.620
		2	Kabupaten mesuji	Simpang Pematang		10.000
		3	Kabupaten Way Kanan	Balambang Umpu	Beroperasi	9.460

REKAPITULASI UPPKB YANG SUDAH REGISTER

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA UPPKB	KETERANGAN	LUAS TANAH
3	DI Yogyakarta					
		2	Kabupaten Sleman	Kalitirto	Beroperasi	4.211
		3	Kabupaten Sleman	Martani	Beroperasi	4.733
4	Kalimantan Tengah	1	Kabupaten Kapuas	Anjir Serapat	Beroperasi	
		2	Kabupaten Barito timur	Pasar Panas	Beroperasi	
5	Kalimantan Selatan	1	Kota Banjar Baru	Liang Anggang		2.400
		2	Kabupaten Tanah Laut	Kintap	Beroperasi	9.940
6	NTT	1	Kota Kupang	Oesapa		4.215
		2	Kota Kupang	Nun Baun Sabu	Beroperasi	2.120
		3		Nggorang		3.059
		4		Watualo	Beroperasi	8.255
7	Bali	1	Kabupaten Jembrana	Cekik	Beroperasi	19.515
		2	Kabupaten Buleleng	Seririt		3.600
8	Jawa Timur	1	Kabupaten Bangkalan	Socah		2.297
		2	Kabupaten Banyuwangi	Kalibiru Manis	Beroperasi	16.600
		3	Kabupaten Banyuwangi	Watudodol	Beroperasi	4.880
		4	Kabupaten Blitar	Talun	Beroperasi	10.200
		5	Kabupaten Bojonegoro	Baureno	Beroperasi	9.760
		6	kabupaten Jember	Rambi Gundam		6.590
		7	Kabupaten Jombang	Mojoangung	Beroperasi	2.900
		8	Kabupaten Lamongan	Lamongan		6.045
		9	Kabupaten Lumajang	Klakah		8.091
		10	Kabupaten Malang	Singosari	Beroperasi	7.570
		11	Kabupaten Mojokerto	Trowulan	Beroperasi	300
		12	kabupaten Nganjuk	Guyangan	Beroperasi	10.615
		13	kabupaten Ngawi	Widodaren	Beroperasi	9.850
		14	Kabupaten Pasuruan	Resojo	Beroperasi	8.905
		15	Kabupaten Pasuruan	Sedarum	Beroperasi	7.105
		16	Kabupaten Sampang	Jrengkik		7.200

REKAPITULASI UPPKB YANG SUDAH REGISTER

NO	PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA UPPKB	KETERANGAN	LUAS TANAH
9	Jawa Timur	17	Kabupaten Sidoarjo	Trosobo	Beroperasi	9.720
		18	Kabupaten Sitobondo	Besuki		10.180
		19	Kabupaten Tuban	Widang	Beroperasi	9.440
		20	Kabupaten Tulung Agung	Pojok	Beroperasi	17.000

REKAPITULASI UPPKB YANG BEROPERASI DAN TIDAK BEROPERASI

No	Provinsi	2018			2019			2020		
		Operasi (Buka)	Tidak Operasi (Tutup)	Jumlah	Operasi (Buka)	Tidak Operasi (Tutup)	Jumlah	Operasi (Buka)	Tidak Operasi (Tutup)	Jumlah
1	Aceh	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	Sumatera Utara	5	8	13	5	8	13	5	8	13
3	Sumatera Barat	2	7	9	4	5	9	4	5	9
4	Riau	1	2	3	2	1	3	2	1	3
5	Jambi	2	2	4	3	1	4	3	1	4
6	Bengkulu	1	1	2	1	1	2	1	1	2
7	Sumatera Selatan	4	1	5	0	5	5	0	5	5
8	Lampung	1	2	3	1	2	3	1	2	3
9	Kalimantan Timur	0	1	1	1	0	1	1	0	1
10	Kalimantan Selatan	0	2	2	1	1	2	1	1	2
11	Kalimantan Tengah	1	1	2	2	0	2	2	0	2
12	Kalimantan Barat	2	4	6	4	2	6	4	2	6
13	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jawa Barat	2	6	8	5	3	8	5	3	8
15	Jawa Tengah	5	9	14	7	7	14	7	7	14
16	DI Yogyakarta	1	2	3	3	0	3	3	0	3
17	Jawa Timur	4	16	20	10	10	20	10	10	20
18	Bali	1	1	2	1	1	2	1	1	2
19	Sulawesi Utara	1	2	3	2	1	3	2	1	3
20	Sulawesi Selatan	2	10	12	8	4	12	8	4	12
21	Sulawesi Tengah	1	3	4	3	1	4	3	1	4
22	Sulawesi Tenggara	1	0	1	1	0	1	1	0	1
23	Nusa Tenggara Barat	1	1	2	1	1	2	1	1	2
24	Nusa Tenggara Timur	1	3	4	1	3	4	1	3	4
25	Maluku	1	0	1	1	0	1	1	0	1
26	Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	1	1	2	2	0	2	2	0	2
29	Babel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Banten	1	2	3	2	1	3	2	1	3
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	1	2	3	2	1	3	2	1	3
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		45	89	134	75	59	134	75	59	134

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT NOMOR : SK.5857/AJ.005/DRJD/2018 TENTANG PENETAPAN
PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI SELURUH INDONESIA**

- a) bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat perubahan penetapan pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia.
- b) bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, diatur bahwa penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilakukan berdasarkan pertimbangan ketidaksesuaian penentuan lokasi dan penilaian kinerja pencapaian Standard Pelayanan Minimum;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang perubahan at
- d) as keputusan direktur jenderal perhubungan darat nomor: SK.5857 /AJ.005/DRJD/2018 tentang penetapan pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di seluruh indonesia.

Sebanyak 9 UPPKB diantaranya dijadikan sebagai *Pilot Project* bekerjasama dengan PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia, yaitu :

- 1. UPPKB Seumadam, Aceh
- 2. UPPKB Sarolangun, Jambi
- 3. UPPKB Senawar Jaya, Sumatera Selatan
- 4. UPPKB Losarang, Jawa Barat
- 5. UPPKB Wanareja, Jawa Tengah
- 6. UPPKB Widang, Jawa Timur
- 7. UPPKB Widodaren, Jawa Timur

1.4.3. Permasalahan Penyelenggaraan UPPKB

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan UPPKB, yaitu:

- 1) Kondisi Prasarana UPPKB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam PM 134 Tahun 2015.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM untuk operasional UPPKB baik dari sisi kuantitas maupun kualitas karena beberapa daerah tidak menyerahkan personil ke Kementerian Perhubungan.
- 3) Sistem penegakan hukum dan sanksi belum menimbulkan efek jera dan masih rentan terhadap penyalahgunaan (pungutan liar).
- 4) NSPK belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas dilapangan.

- 5) Pengawasan yang dilakukan masih bersifat manual sehingga kurang efektif maka perlunya dibangun suatu sistem pengawasan yang menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mencari langkah-langkah strategis demi terwujudnya pengelolaan UPPKB yang sesuai dengan slogannya yaitu “Jembatan Timbang Wow Semakin Pas dan Keren”.

1.4.4. Penyelenggaraan Kepengusahaan

Sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan bahwa kewenangan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor beralih kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dari keseluruhan Prasarana Transportasi Jalan tersebut belum dimaksimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara terdapat 5 (lima) bentuk skema pemanfaatan yaitu Pinjam Pakai, Sewa, Bangun Serah Guna (BGS) dan Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama dalam Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Melalui skema pemanfaatan BMN yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan BMN serta meningkatkan PNBP dengan tidak merubah tugas dan fungsi Kemterian/Lembaga.

Salah satu kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan kepengusahaan adalah Kepemilikan aset Prasarana baik Terminal Tipe A maupun Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum tercatat dalam SIMAK BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga proses kerjasama tidak dapat dilakukan karena terkendala Penetapan Status Penggunaan (PSP).

1.4.5. Permasalahan Keselamatan Transportasi Jalan

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

1.4.6. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **BAB I PENDAHULUAN** memuat Penjelasan umum organisasi, Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.
2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA** memuat Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019.
3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
4. **BAB IV PENUTUP** memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. **LAMPIRAN**
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Jumlah kegiatan di Rencana Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Total Pagu Anggaran **Rp.328,251,389,000. ,-**

II.1.Uraian Singkat Perencanaan Strategis Tahun 2020.

DAFTAR MAK

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan					
	Nama Satker	Jumlah Anggaran	Realisasi Belanja			% Realisasi Anggaran
			Jumlah S.D Bulan November	Bulan Desember	Jumlah S.D Bulan Desember	
	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	328.251.389.000	228.434.529.585	96.893.808.955	325.328.338.540	99.11
	022.03.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat				
	1162	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan				
	1162.001	Layanan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan				
	1162.001.008	Dokumen Perencanaan Teknis				
	051	Penyusunan Dokumen Pra FS, FS, SID, DED, Masterplan, dan Rencana Induk				
	A)	Dokumen Perencanaan Teknis Terminal				
		536111	Belanja Modal Lainnya	RM	4.072.000.000	Input Realisasi
	B)	Dokumen Perencanaan Teknis UPPKB				
		536111	Belanja Modal Lainnya	RM	3.812.222.000	Input Realisasi
	C)	Dokumen Perencanaan Teknis Fasilitas Pendukung Integrasi Moda				
		536111	Belanja Modal Lainnya	RM	6.321.351.000	Input Realisasi
	E)	Dokumen Perencanaan Teknis Subdit Bimbingan Kepengusahaan				
		536111	Belanja Modal Lainnya	RM	4.003.428.000	Input Realisasi
	F)	Penyusunan Project Management Unit (PMU) Kegiatan Prasarana Jalan				
		522131	Belanja Jasa Konsultan	RM	902.825.000	Input Realisasi
	1162.001.007	Tugas Pokok dan Fungsi				
	054	Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Jalan				
	A)	BIMBINGAN TEKNIK PERATURAN FASILITAS PENDUKUNG				

	DAN INTEGRASI MODA					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	82.306.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	25.694.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	0	Input Realisasi	-
	522151	Belanja Jasa Profesi	RM	74.515.000	Input Realisasi	-
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	143.920.000	Input Realisasi	-
B)	Penyusunan Lakip, Laptah dan PK					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	25.000.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	25.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	40.000.000	Input Realisasi	-
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RM	42.500.000	Input Realisasi	-
C)	Pembahasan RKA KL Tahun 2021					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	43.874.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	52.900.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	102.994.000	Input Realisasi	-
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RM	26.000.000	Input Realisasi	-
D)	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan					
	521211	Belanja Bahan	RM	45.000.000	Input Realisasi	-
	521213	Honor Output Kegiatan	RM	0	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	40.052.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	9.660.000	Input Realisasi	-
	522151	Belanja Jasa Profesi	RM	15.000.000	Input Realisasi	-
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	138.500.000	Input Realisasi	-
E)	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan UPPKB					
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	203.105.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	53.924.000	Input Realisasi	-

	522151	Belanja Jasa Profesi	RM	171.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	584.870.000	Input Realisasi	-
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	529.900.000	Input Realisasi	-
F)	Bimbingan Teknis Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A					
	521211	Belanja Bahan	RM	39.100.000	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	96.072.000	Input Realisasi	-
	522151	Belanja Jasa Profesi	RM	21.000.000	Input Realisasi	-
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	157.528.000	Input Realisasi	-
G)	Semiloka Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan KSPN					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	20.916.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	22.100.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	3.688.000	Input Realisasi	-
	522151	Belanja Jasa Profesi	RM	25.400.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	13.956.000	Input Realisasi	-
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RM	55.540.000	Input Realisasi	-
055	Tupoksi Bidang Prasarana Transportasi Jalan					
A)	Survey dan Monitoring Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru					
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	50.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	503.914.000	Input Realisasi	-
B)	Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	80.000.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	70.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	1.197.037.000	Input Realisasi	-
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	RM	50.000.000	Input Realisasi	-
D)	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja UPPKB					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	53.089.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	27.451.000	Input Realisasi	-

	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	28.639.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	228.730.000	Input Realisasi	-
E)	Monitoring Pelaksanaan Identifikasi Pembangunan Terminal Angkutan Jalan					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	90.316.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	24.999.000	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	50.000.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	35.001.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	389.684.000	Input Realisasi	-
F)	Monitoring dan Evaluasi Integrasi Moda					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	37.770.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	23.600.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	11.040.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	477.790.000	Input Realisasi	-
G)	Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Pendukung					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	0	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	0	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	0	Input Realisasi	-
H)	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB					
	521211	Belanja Bahan	RM	32.411.000	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	25.893.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	14.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	60.054.000	Input Realisasi	-
I)	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana Yang Akan Dikerjasamakan					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	0	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	15.036.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	82.000	Input Realisasi	-
J)	Monitoring Perencanaan UPPKB					

	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	36.890.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	73.725.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	79.808.000	Input Realisasi	-
K)	Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	75.000.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	20.000.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	14.455.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	52.505.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	191.190.000	Input Realisasi	-
L)	Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	50.000.000	Input Realisasi	-
	521213	Honor Output Kegiatan	RM	83.400.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	25.662.000	Input Realisasi	-
	522151	Belanja Jasa Profesi	RM	86.400.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	108.738.000	Input Realisasi	-
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RM	48.640.000	Input Realisasi	-
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	RM	33.300.000	Input Realisasi	-
M)	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	76.366.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	20.000.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	36.200.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	149.410.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	121.966.000	Input Realisasi	-
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RM	28.196.000	Input Realisasi	-
N)	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI					
	521119	Belanja Barang Operasional	RM	65.000.000	Input Realisasi	-

		Lainnya				
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	55.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	67.902.000	Input Realisasi	-
O)	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	90.233.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	30.249.000	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	40.067.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	29.751.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	609.700.000	Input Realisasi	-
P)	Evaluasi, Pengawasan, Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Barang					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	20.000.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	20.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	70.000.000	Input Realisasi	-
Q)	Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	163.400.000	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	100.000.000	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	136.600.000	Input Realisasi	-
R)	Monitoring Operasional Terminal Tipe A					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	80.000.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	80.000.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	0	Input Realisasi	-
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	462.800.000	Input Realisasi	-
1162.001.005	Fasilitas Pendukung Integrasi Moda					
051	Trotoar					
A)	Pembangunan Fasilitas dan Penunjang Jalur Sepeda					
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	RM	6.894.169.000	Input Realisasi	-
056	Tempat Istirahat (Rest Area)					
A)	Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran					
	522191	Belanja Jasa Lainnya	RM	1.605.000.000	Input Realisasi	-

1162.001.004	Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor					
052	Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor					
A)	Pengadaan Weight in Motion (WIM) dan fasilitas pendukung UPPKB					
	536111	Belanja Modal Lainnya	PNBP	4.700.000.000	Input Realisasi	-
054	Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online					
B)	Pengadaan Perangkat Sistem Monitoring Penunjang Kinerja UPPKB					
	536111	Belanja Modal Lainnya	PNBP	9.010.414.000	Input Realisasi	-
056	Operasional Jembatan Timbang					
A)	Pengadaan Alat Survei Monitoring UPPKB					
	536111	Belanja Modal Lainnya	RM	135.928.000	Input Realisasi	-
057	Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua					
A)	Kerjasama Operasional UPPKB Pihak ke 2					
	522191	Belanja Jasa Lainnya	RM	41.553.347.000	Input Realisasi	-
1162.001.001	Terminal					
051	Pembangunan Terminal					
A)	Pembangunan Terminal Anak Air Padang Tahap III					
	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	SBSN	62.503.284.000	Input Realisasi	-
053	Perbaikan Pelayanan dan Ketertiban Terminal Penumpang Tipe A					
A)	Pengadaan Vending Machine E-Ticketing 12 Terminal Tipe A					
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PNBP	742.500.000	Input Realisasi	-
C)	Pengadaan dan Pemasangan Vending Machine E-Ticketing dan E-gate penumpang di Terminal Tipe A					
	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	RM	3.500.000.000	Input Realisasi	-
D)	Pengadaan Perlengkapan Pendukung Operasional Terminal					
	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	RM	10.000.000.000	Input Realisasi	-
E)	Pengadaan kendaraan pengangkut sampah di Terminal Penumpang Tipe A					
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	RM	2.699.411.000	Input Realisasi	-
054	Revitalisasi/Rehabilitasi Terminal					
A)	tanpa sub komponen					
	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	RM	144.254.999.000	Input Realisasi	-
1162.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
1162.951.001	Layanan Internal Overhead					
052	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi					

A)	Perangkat Pengolah Data dan Informasi					
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	RM	472.500.000	Input Realisasi	-
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					
A)	Belanja Peralatan dan Mesin					
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	RM	177.940.000	Input Realisasi	-
1953	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat					
1953.994	Layanan Perkantoran					
1953.994.001	Layanan Perkantoran					
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
A)	Belanja Keperluan Perkantoran					
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	RM	1.307.960.000	Input Realisasi	-
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	RM	529.200.000	Input Realisasi	-
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	RM	273.120.000	Input Realisasi	-
B)	Belanja Keperluan sehari hari Direktorat					
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	RM	250.000.000	Input Realisasi	-
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	110.000.000	Input Realisasi	-
	521211	Belanja Bahan	RM	68.040.000	Input Realisasi	-
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	RM	300.000.000	Input Realisasi	-
	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	RM	120.000.000	Input Realisasi	-
C)	Belanja Honorarium Output Kegiatan					
	521213	Honor Output Kegiatan	RM	233.521.000		
D)	Sewa Gedung Perkantoran					
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RM	227.719.000	Input Realisasi	-
	522141	Belanja Sewa	RM	2.156.943.000	Input Realisasi	-
E)	Belanja Sewa					
	522141	Belanja Sewa	RM	515.750.000	Input Realisasi	-
F)	Belanja Perjalanan Dinas					
	524111	Belanja perjalanan biasa	RM	170.000.000	Input Realisasi	-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 dilihat dari Aplikasi e-Performance per Semester

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DENGAN RENCANA AKSI

APLIKASI E-PERFORMANCE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Tahun : 2020
Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Unit Eselon II : DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DENGAN RENCANA AKSI																	
APLIKASI E-PERFORMANCE																	
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA																	
Tahun		: 2020															
Unit Eselon I		: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT															
Unit Eselon II		: DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN															
NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2020			TW.II			TW.III			TW.IV			TARGET PK	CAPAIAN	CAPAIAN (%)
			TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(7)			(8)			(9)		
1. JUMLAH PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN																	
1.	JUMLAH PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	UNIT	0	0	0	0	1	33.33	0	1	33.33	3	1	33.33	3	3	100%
2. JUMLAH DUKUNGAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN																	
2.	JUMLAH DUKUNGAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	Lokasi	0	0	0	0	2	20	0	2	20	10	6	60	10	10	100%
3. JUMLAH DOKUMEN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN																	
3.	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	LAPORAN	0	0	0	0	0	0	0	10	6	25	15	9	25	25	100%
4. JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN																	
4.	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	LAPORAN	0	0	0	0	5	0.85	0	5	0.85	17	7	1.19	17	17	100%
5. JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN																	
5.	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI	LAPORAN	0	2	0	0	2	20	0	2	20	7	3	60	7	7	100%
6. JUMLAH KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN																	
6.	JUMLAH KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN	LAPORAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	100	6	6	100%

II.2.PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2020

Dokumen penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/dinas lain.

Adapun komponen penetapan kinerja meliputi :

Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada penetapan kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi.

Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perhubungan Darat yang menjadi tanggung jawab Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

- a. Masukan (***Inputs***) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (***Outputs***) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- c. Hasil (**Outcomes**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (**benefit**) adalah kegunaan suatu keluaran (**outputs**) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (**impacts**) adalah ukuran tingkat pengaruh soial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus terorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya :

- a. Spesifik dan jelas;
- b. Dapat diukur secara obyektif;
- c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2020

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Layanan Internal Organisasi	1. Belanja Keperluan Perkantoran	1	Kegiatan
			2. Peralatan Modal dan Mesin	1	Kegiatan
			3. Belanja Honorarium Output Kegiatan	1	Kegiatan
			4. Sewa Gedung / Gudang Perkantoran	1	Tahun
			1. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR	1	Kegiatan
			2. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri	1	Kegiatan
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Darat	1. Penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan PK	1	Kegiatan
			2. Pembahasan RKA-KL Kemenhub Tahun 2021	1	Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Transportasi Jalan	1.a.	Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	1
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	2.a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	Laporan	3
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.a.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Kegiatan	2
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.a.	Jumlah Bimbingan Teknis untuk SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Kegiatan	1

Kegiatan

1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang
2. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pare-Pare (Sulsel)
3. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Pematang Siantar Sumut
4. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi NAD (Lhoksumawe, Meulaboh, Takengon)
5. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan
6. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalan
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A

Anggaran

Rp. 31.066.700.000,-
Rp. 500.000.000,-
Rp. 750.000.000,-
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 800.000.000,-
Rp. 300.000.000,-
Rp. 500.000.000,-

Pihak Kedua,

MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Disetujui

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama,

AHMADI ZB, ATD, SE, MM

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19660513 198903 1 001



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
							T1	T2	T3	T4	
	(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Transportasi Jalan	1.a.	Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan	1	Lokasi	1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang	✓	✓	✓	✓	Kasubdit Terminal Angkutan Jalan
2.	Tersusun Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	2.a.	Jumlah Dokumen kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	3	Laporan	1. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pare-Pare (Sulsel)		✓	✓		Kasubdit Terminal Angkutan Jalan
						2. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Pematang Siantar Sumut		✓	✓		
						3. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi NAD (Lhoksumawe, Meulaboh, Takengon)		✓	✓		
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.a.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	2	Kegiatan	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal	✓	✓	✓	✓	Kasubdit Terminal Angkutan Jalan
						2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalan	✓	✓	✓	✓	
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.a.	Jumlah Bimbingan Teknis untuk SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Kegiatan	1. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A		✓			Kasubdit Terminal Angkutan Jalan

Pihak Kedua,

MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama,

AHMADI ZB, ATD, SE, MM

Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19660513 198903 1 001



NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB		
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.d Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	Kegiatan	1

**Kegiatan Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor
Kegiatan**

	Anggaran
1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online	Rp. 8.000.000.000
2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2	Rp. 90.000.000.000
3. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
5. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
6. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
7. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 500.000.000
8. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 800.000.000
9. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	Rp. 1.000.000.000
10. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB	Rp. 500.000.000
11. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB	Rp. 344.600.000
12. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	Rp. 982.096.000

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM.

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19670608 199003 1 005



Ir. MULYAHADI, MSTr

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19660227 199103 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	1.a.	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan: 1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online 2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2	Laporan	2
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	2.b.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan: 1. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi) 2. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi) 3. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi) 4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi) 5. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah 6. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah 7. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	Laporan	7
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.c	Jumlah Monitoring dann Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB;	Kegiatan	2

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB		
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.d	Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	Kegiatan	1

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KASUBDIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUN G JAWAB
							T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	a.	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	2	Laporan	1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online		√	√	√	Kasubdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
						2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2		√	√	√	
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	b.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	7	Laporan	1. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah			√	√	
						2. Penyusunan Fcasibility Study (FS) UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√		
						3. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	√	√	√		

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	√	√	√		
				5. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	√	√	√		
				6. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	√	√	√		
				7. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	√	√	√		
3.	Tertindakannya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	c.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	2 Kegiatan	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB	√	√	√	√
					2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB	√	√	√	√
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	d.	Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1 Kegiatan	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	√	√	√	√

Pihak Kedua,

MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM.

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta,

2019

Pihak Pertama,



Ir. MULYAHADI, MStr

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19660227 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	1.a.	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan 1. Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru 2. Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran	Lokasi Lokasi	2
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	2.a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Darat: 1. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Provinsi Jawa Barat dan Banten 2. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 3. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba 4. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika 5. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Labuan Bajo 6. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur dan NYIA	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	6
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.a.	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat: 1. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan 2. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi Moda Prasarana Transportasi Jalan	Kegiatan	2
4.	Tersedianya ASN di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.a.	Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Darat: 1. Bimbingan Teknis Pengenalan Transit Oriented Development	Kegiatan	1

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Disetujui

Jakarta, Juni 2019

Pihak Pertama,


TITO GESIT UTIARTO, SE, DESS
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19650117 199003 1 003

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA TAHUN 2019
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggung Jawab
				T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	2	Kegiatan	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru				Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				2. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran				Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	6	Laporan	1. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten				Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
				2. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Daerah Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta				Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
				3. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba				Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				4. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika				Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				5. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Labuan Bajo				Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
				6. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur dan NYIA				Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat	2	Laporan	1. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan				Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				2. Monitoring dan Evaluasi Integrasi				Kasi Integrasi Moda

Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan					Moda Transportasi Jalan					Transportasi Jalan
Tersedianya ASN di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Kegiatan	1	Bimbingan Teknis Pengenalan Transit Oriented Development (TOD)					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan

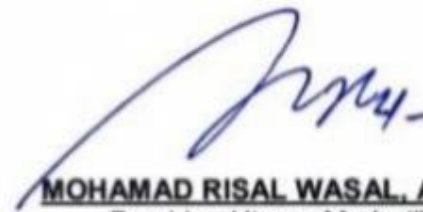
Jumlah Anggaran

Kegiatan : Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Rp. 8.951.782.000,-

Jakarta, Juni 2019

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD. MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Pihak Pertama,


TITO GESIT UTIARTO, SE, DESS
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19650117 199003 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	1.a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan: 1. Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Tengah 2. Penyusunan Pra Studi Kelayakan/ <i>Outline Business Case</i> (OBC) KPBU Terminal Tipe A di Jawa Tengah	Laporan	2
2.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1.b.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 3. Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ	Kegiatan	3
3.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	1.c.	Jumlah Bimbingan Teknis Sosialisasi, dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepengusahaan	Kegiatan	1

Kegiatan Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Pra FS, FS, SID, DED, Masterplan, dan Rencana Induk
2. Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Jalan
3. Tupoksi Bidang Prasarana Transportasi Jalan

Anggaran

Rp. 2.112.726.000
Rp. 600.000.000
Rp. 1.355.000.000

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, Desember 2019

Pihak Pertama,


SUSANTY PERTIWI, SS, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740720 199703 2 001

**RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA
SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA TAHUN 2019
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggung Jawab		
				T1	T2	T3	T4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	2	Laporan	1	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Tengah			√	Kasi Penyelenggaraan Kemitraan	
				2	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/ <i>Outline Business Case</i> (OBC) KPBU Terminal Tipe A di Jawa Tengah				√	Kasi Pengawasan dan Evaluasi
Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3	Kegiatan	1	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan	√	√	√	√	Kasi Penyelenggaraan Kemitraan
				2	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta	√	√	√	√	Kasi Penyelenggaraan Kemitraan
				3	Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ	√	√	√	√	Kasi Pengawasan dan Evaluasi
Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	Jumlah Bimbingan Teknis Sosialisasi, dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Kegiatan	1	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepengusahaan		√	√	√	Kasi Pengawasan dan Evaluasi

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD. MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, Desember 2019

Pihak Pertama,


SUSANTY PERTIWI, SS, M.Hum
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19740720 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUDARMAJI, SAP., MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MOHAMAD RISAL WASAL., ATD., MM**

Jabatan : **DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA


MOHAMAD RISAL WASAL., ATD., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 1990031 005

Jakarta, Januari 2020
PIHAK PERTAMA


SUDARMAJI, SAP., MM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19720814 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASUBBAG TATA USAHA
UNIT KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Layanan Internal Organisasi	1. Belanja Keperluan Perkantoran;	1	Tahun
			2. Belanja Keperluan sehari-hari Direktorat;	1	Tahun
			3. Peralatan Modal dan Mesin;	1	Kegiatan
			4. Belanja Honorarium Output Kegiatan	1	Tahun
			5. Sewa Gedung Perkantoran;	1	Tahun
			6. Belanja Sewa;	1	Tahun
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Studi Kebijakan	1. Penyusunan Project Management Unit (PMU) Kegiatan Prasarana Jalan	1	Kegiatan
3.	, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Jalan	1. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri;	1	Kegiatan
			2. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI;	1	Kegiatan
			3. Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat;	1	Kegiatan
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	Jumlah Bimbingan Teknis Prasarana Transportasi Jalan	1. Penyusunan Lakip, Laptah dan PK	1	Kegiatan
			2. Pembahasan RKA KL Tahun 2021	1	Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KASUBBAG TATA USAHA
UNIT KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Belanja Keperluan Perkantoran;	2.166.040.000,-
2.	Belanja Keperluan sehari-hari Direktorat;	750.000.000,-
3.	Peralatan Modal dan Mesin;	650.440.000,-
4.	Belanja Honorarium Output Kegiatan	143.520.000,-
5.	Sewa Gedung Perkantoran;	2.000.000.000,-
6.	Belanja Sewa	620.000.000,-
7.	Penyusunan Project Management Unit (PMU) Kegiatan Prasarana Jalan	1.000.000.000,-
8.	Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri;	1.000.000.000,-
9.	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI;	500.000.000,-
10.	Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat;	250.000.000,-
11.	Penyusunan Lakip, Laptah dan PK	150.000.000,-
12.	Pembahasan RKA KL Tahun 2021	208.268.000,-
TOTAL		9.438.268.000,-

PIHAK KEDUA

Jakarta, Januari 2020
PIHAK PERTAMA


MOHAMAD RISAL WASAL,ATD.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 1990031 005


SUDARMAJI,SAP.,MM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19720814 199803 1 003

A. PROGRAM DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN yang telah ditetapkan, maka disusunlah program yang merupakan suatu kegiatan pokok yang menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang direncanakan

Sebagai turunan dari kebijakan Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN. Adapun program-program tersebut antara lain:

- a) Pembangunan dan rehabilitasi Terminal;
- b) Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB;
- c) Pembangunan dan peningkatan Bimbingan Kepengusahaan;
- d) Penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di bidang Prasarana Transportasi Jalan.

B. KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Untuk mencapai program yang telah ditetapkan maka disusun berbagai kegiatan Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN tahun 2020, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang ditampung pada DIPA Satker Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN maupun yang ditampung pada DIPA Satker Hubdat di beberapa Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang.
2. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pare-Pare (Sulsel).
3. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Pematang Siantar Sumut.
4. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi NAD (Lhoksumawe, Meulaboh, Takengon).
5. Monitoring Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.
6. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.
7. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalan.
8. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A.
9. Pembangunan Jalur Khusus BRT di Kota Pekanbaru.
10. Penyediaan Fasilitas rest Area pada masa Angkutan Lebaran.
11. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda daerah Propinsi Jawa Barat dan Banten.
12. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda daerah Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
13. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan.
14. Bimbingan Teknis Pengenalan Transit Oriented Development (TOD).
15. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online.
16. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2.
17. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi).
18. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi).
19. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi).
20. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi).
21. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah.

22. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah.
23. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik.
24. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB.
25. Monitoring
26. Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas UPPKB.
27. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB.
28. Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.
29. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan dikerjasamakan.
30. Monitoring Pekerjaan Perencanaan High and Best used (Pendampingan Konsultan).
31. Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ.
32. Sosialisasi Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2020

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Idealnya pengukuran kinerja tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang up to date mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap IKU organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKU akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Penggunaan aplikasi e-Performance untuk memudahkan pelaksanaan monitoring agar dapat lebih intensif penggunaannya dan diharapkan sampai akhir tahun 2020, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan selaku unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memanfaatkan sistem aplikasi tersebut ini secara optimal, sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.



III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

- 2) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

- a) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2020;
- b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja pada dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- c) Analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja;
- d) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 terhadap Target Kinerja Tahun 2020

Perbandingan target dan realisasi kinerja ini merupakan perbandingan capaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja tahun 2020. Untuk tahun 2015-2018 tidak dapat dibandingkan, Hal ini disebabkan karena IKK ini merupakan IKK yang ada pada unit organisasi baru di tahun 2019. Terdapat perbedaan indikator kinerja pada tahun 2016, 2017, dan 2018, dimana pada tahun 2019 terdapat perubahan unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga realisasi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.



➤ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja Tahun 2020**

Selama tahun 2020, realisasi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan secara umum telah berhasil dicapai dengan baik. Hasil realisasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar **(*Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Pagu Anggaran (99.11 %)*)** Hasil capaian ini diperoleh melalui perbandingan antara nilai total realisasi dan target seluruh sasaran program di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020.

➤ **Capaian Kinerja**

Tingkat capaian kinerja Unit Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Sasaran Program (SP) unit kerja AKUNTABILITAS KINERJA dicapai melalui :

- a. Identifikasi IKU pada setiap SP, dimana setiap SP minimal memiliki satu IKU;
- b. Setiap IKU dilakukan pengukuran capaian kinerjanya (dalam %) melalui perbandingan realisasi dengan targetnya; dan
- c. Nilai capaian kinerja setiap IKU dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok IKU yang menunjukkan kinerja SP dimaksud, sama halnya dengan nilai/tingkat capaian kinerja suatu IKU merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang mendukung IKU dimaksud. Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2020, dengan tetap mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program dijabarkan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Lokasi	1	0	0
2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	100%
3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	100%
4	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru	Lokasi	1	1	100%
5	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	100%
1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Terminal Tipe A	Laporan	3	3	100%
2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Laporan	7	7	100%
3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	100%
4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	100%
1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	100%
2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	2	2	100%
3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	2	2	100%
4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	100%
1	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	100%
2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	100%
3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	1	1	100%



4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja UPPKB	Kegiatan	2	2	100%
2	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan	Kegiatan	1	1	100%
3	Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri	Kegiatan	1	1	100%
4	Monitoring dan evaluasi Integrasi Moda Transportasi Jalan	Kegiatan	1	1	100%
5	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	100%
6	Evaluasi , Pengawasan dan penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalana	Kegiatan	1	1	100%
7	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana yang akan di kerjasamakan	Kegiatan	1	1	100%
8	Monitoring Pekerjaan Perencanaan high and best used (Pendampingan Konsultan)	Kegiatan	1	1	100%
9	Monitoring Pelaksanaan pememanfaatan BMN Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	100%
10	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB	Kegiatan	1	1	100%
11	Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI	Kegiatan	1	1	100%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	Laporan	1	1	100%
2	Belanja Keperluan Sehari hari Direktorat	Laporan	1	1	100%
3	Belanja Honorium Ouput Kegiatan	Laporan	1	1	100%
4	Sewa Gedung Perkantoran	Laporan	1	1	100%
5	Belanja Sewa	Laporan	1	1	100%
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Laporan	1	1	100%



III.3. ANALISIS EFISIENSI

Analisis Efisiensi dilihat dari Pagu Anggaran Tahun 2020

NO	URAIAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	PAGU	REALISASI ANGRAN	CAPAIAN
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			
1	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Lokasi	3	0	Rp.62.503.284.000	Rp.62.502.840.977	100%
		2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	Rp.4.700.000.000	Rp.4.224.000.000	100%
		3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	Rp.41.553.347.000	Rp.41.553.347.000	100%
		4	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	Rp.1.605.000.000	Rp.1.605.000.000	100%
2	JUMLAH PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Terminal Tipe A	Laporan	3	3	Rp.19.311.825.000	Rp.19.047.810.500	98.63%
		2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Laporan	7	7	Rp.3.812.222.000	Rp.3.812.090.000	100%



		3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	Rp.6.321.351.000	Rp.6.321.351.000	100%
		4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	Rp.4.003.428.000	Rp.3.916.069.500	97.82%
3	JUMLAH DUKUNGAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	Rp.590.000.000	Rp.589.929.650	99.99%
		2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	2	2	Rp.337.909.000	Rp.337.867.650	99.99%
		3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	2	2	Rp.550.200.000	Rp.550.138.004	99.99%
		4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	Rp 1.180.286.000	Rp 1.164.662.060	99.22%
4	JUMLAH	1	Jumlah	Kegiatan	1	1	Rp.347.200.000	Rp.346.874.800	99.91%



	DOKUMEN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	n					
		2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	Rp.1.542.799.000	Rp.1.542.503.036	99.98%
		3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	1	1	Rp.417.690.000	Rp.417.585.300	99.97%
		4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	Rp.248.212.000	Rp.247.066.700	99.54%
5	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja UPPKB	Kegiatan	2	2	Rp.337.909.000	Rp.337.867.650	99.99%
		2	Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri	Kegiatan	1	1	Rp.1.397.037.000		100%
		3	Monitoring dan evaluasi Integrasi Moda Transportasi Jalan	Kegiatan	1	1	Rp.550.200.000	Rp.550.138.004	99.99%
		4	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	Rp.590.000.000	Rp.589.929.650	99.99%



		5	Evaluasi , Pengawasan dan penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalana	Kegiata n	1	1	Rp.110.000.000	Rp.108.456.350	98.60%
		6	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana yang akan di kerjasamakan	Kegiata n	1	1	Rp.15.118.000	Rp.14.999.600	99.22%
		7	Monitoring Pekerjaan Perencanaan high and best used (Pendampinga n Konsultan)	Kegiata n	1	1	Rp.729.028.000	Rp.713.851.260	97.92%
		8	Monitoring Pelaksanaan pememafaata n BMN Prasarana Perhubungan Darat	Kegiata n	1	1	Rp.373.150.000	Rp.373.128.480	99.99%
		9	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB	Kegiata n	1	1	Rp.337.909.000	Rp.337.867.650	99.89%
		10	Pendampinga n Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI	Kegiata n	1	1	Rp.187.902.000	Rp.187.839.400	99.97%
6	JUMLAH KEGIATA N LAYANAN PERKANT ORAN								
		1	Belanja Keperluan Perkantoran	Laporan	1	1	Rp.2.110.280.000	Rp.2.109.127.589	99.95%
		2	Belanja Keperluan Sehari hari Direktorat	Laporan	1	1	Rp.848.040.000	Rp.822.766.620	97.02%
		3	Belanja Honorium Ouput Kegiatan	Laporan	1	1	Rp.233.521.000	Rp.233.429.000	99.96%
		4	Sewa Gedung Perkantoran	Laporan	1	1	Rp.2.384.662.000	Rp.2.384.108.200	99.98%



		5	Belanja Sewa	Laporan	1	1	Rp.515.750.000	Rp.515.715.000	99.99%
		6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Laporan	1	1	Rp.170.000.000	Rp.169.467.000	99.69%

ANALISIS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

III.4. Analisis Efisiensi

Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dilihat dari Aplikasi e-Performance pertarget Bulanan

		■ Lengkap (L) ■ Tidak Lengkap (TL) ■ Kosong (K) PK Belum Ada											
No	Unit Eselon II	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)
1.	JUMLAH PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
1.	JUMLAH PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
2.	JUMLAH DUKUNGAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
2.	JUMLAH DUKUNGAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
3.	JUMLAH DOKUMEN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
3.	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
4.	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
4.	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
5.	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
5.	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI
6.	JUMLAH KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN
6.	JUMLAH KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN



III.5. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja dilihat dari indikator Keuangan e-monitoring / Span.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah melaksanakan Indikator Kinerja dengan baik, dengan ***Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Pagu Anggaran (99.11 %)***

Rincian analisis pencapaian kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA				
CAPAIAN KINERJA MELALUI APLIKASI e-MONITORING DALAM PERSENTASE KEUANGAN				
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Keu	
Belanja Pegawai	0	0	0,00%	
Belanja Barang	68.914.824.000	68.819.872.050	99,86%	
Belanja Modal	259.336.565.000	256.508.466.490	98,91%	
Total Anggaran	328.251.389.000	325.328.338.540	99,11%	
Persentase	100%	99,11%		
Bulan	Rencana	Realisasi	Persentase	Keterangan
Januari	0	0	0%	Alert
Februari	1.166.397.654	1.166.397.654	100,00%	Excellent
Maret	829.176.611	829.176.611	100,00%	Excellent
April	2.738.259.573	2.738.259.573	100,00%	Excellent
Mei	13.239.679.192	13.239.679.192	100,00%	Excellent
Juni	19.291.526.538	19.291.526.538	100,00%	Excellent
Juli	13.594.636.398	13.594.636.398	100,00%	Excellent
Agustus	42.004.431.657	42.004.431.657	100,00%	Excellent
September	40.550.711.913	40.550.711.913	100,00%	Excellent
Oktober	40.974.841.186	40.974.841.186	100,00%	Excellent
November	93.288.382.514	54.044.868.863	57,93%	Alert
Desember	60.573.345.764	96.893.808.955	159,96%	Excellent
Total	328.251.389.000	325.328.338.540	99,11%	Excellent



Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Khusus dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum anggaran digunakan secara efisien, yang digambarkan dari :

- a. Pelaksanaan kegiatan (*output*) dapat tercapai sesuai target ($\geq 100\%$), dan
- b. Realisasi anggaran kurang dari 100% atau efisiensi anggaran lebih dari 100%.



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembangunan Anak Air Padang (SBSN) (Termasuk Supervisi).	Rp.	62,503,284,000,-
2.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A leuwipanjang	Rp.	22,445,350,000,-
3.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti, Cirebon	Rp.	600,000,000,-
4.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Mangkang, Semarang	Rp.	1,104,483,000,-
5.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto, Banyumas	Rp.	22,816,119,000,-
6.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Kota Surakarta	Rp.	32,220,861,000,-
7.	Pengadaan Weight in Motion (WIM) dan fasilitas pendukung UPPKB	Rp.	4.700.000.000,-
8.	Pengembangan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online	Rp.	2,730,589,000,-
9.	Pengadaan Perangkat Sistem Monitoring Penunjang Kinerja UPPKB	Rp.	9.010.414.000,-
10.	Pengadaan Alat Survei Monitoring UPPKB	Rp.	135.928.000,-
11.	Kerjasama Operasional UPPKB Pihak ke-2	Rp.	41,553,347,000,-
12.	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di 4 Lokasi KSPN	Rp.	26.750.000.000,-
13.	Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran	Rp.	1,605,000,000,-
14.	Penyusunan Pedoman Rancang Bangun Terminal Penumpang	Rp.	1.123.000.000,-
15.	Penyusunan Teknis Pengembangan Simpul Terminal Barang	Rp.	849,000,000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

16.	Penyusunan Dokumen SID Terminal Penumpang Tipe A Lamandau	Rp.	1.000.000.000,-
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
Kegiatan			Anggaran
17.	Penyusunan Dokumen FS Terminal Barang Internasional Sambas, Kalbar	Rp.	1.000.000.000,-
18.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan UPPKB di Provinsi Maluku dan Provinsi NTT	Rp.	945,395,000,-
19.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat	Rp.	958,661,000,-
20.	Penyusunan Pedoman Rancang Bangun UPPKB	Rp.	950.000.000,-
21.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan UPPKB di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu	Rp.	911,598,000
22.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Kelayang	Rp.	465,850,000,-
23.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Morotai	Rp.	699,050,000,-
24.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Wakatobi	Rp.	710,270,000,-
25.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Bromo Tengger Semeru	Rp.	483,780,000,-
26.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Lesung	Rp.	472,340,000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

27.	Penyusunan Kajian Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda di Terminal Terpadu Merak	Rp.	673,640,000,-
28.	Kajian Sistem Transportasi Terintegrasi di Kota Palembang	Rp.	724,990,000,-
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
Kegiatan			Anggaran
29.	Penyusunan Rencana Teknis dan DED Fasilitas Integrasi Moda Transjateng (Kawasan Kedung Sepur)	Rp.	707,818,000,-
30.	Penyusunan Kajian Teknis Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda di Terminal Leuwi Panjang, Jawa Barat	Rp.	674,190,000,-
31.	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Jawa Timur	Rp.	902,600,000,-
32.	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Kalimantan	Rp.	1,022,000,000,-
33.	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Sumatera	Rp.	995,000,000,-
34.	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan	Rp.	2.358.000.000,-
35.	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan	Rp.	1.837.000.000,-
36.	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan	Rp.	1.768.000.000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

37.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Proyek KPBU Pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi	Rp.	1,083,828,000,-
38.	Penyusunan Project Management Unit (PMU) Kegiatan Prasarana Jalan	Rp.	1,102,824,000,-
39.	Survey dan Monitoring Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun;	Rp.	8,641,461,000,-
	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan		
	Kegiatan		Anggaran
41.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja UPPKB;	Rp.	190,423,000,-
42.	Monitoring Pelaksanaan Identifikasi Pembangunan Terminal Angkutan Jalan;	Rp.	15,118,000,-
43.	Monitoring dan Evaluasi Integrasi Moda;	Rp.	550,200,000,-
44.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas;	Rp.	477,790,000,-
45.	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana Yang Akan Dikerjasamakan;	Rp.	60,054,000,-
46.	Monitoring Perencanaan UPPKB;	Rp.	190,423,000,-
47.	Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ;	Rp.	373,150,000,-
48.	Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU;	Rp.	436,140,000,-
49.	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	Rp.	729,028,000,-
50.	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI;	Rp.	187,902,000,-
51.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	Rp.	800.000.000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

52.	Evaluasi, Pengawasan, Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Barang;	Rp.	110,000,000,-
53.	Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat;	Rp.	490,998,000,-
54.	Monitoring Operasional Terminal Tipe A.	Rp.	622,800,000,-
55.	Bimbingan Teknis Peraturan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda;.	Rp.	300,000,000,-
	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan		
	Kegiatan		Anggaran
57.	Pembahasan RKA KL Tahun 2021	Rp.	225,768,000,-
58.	Sosialisasi Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	Rp.	248,212,000,-
59.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan UPPKB;	Rp.	1,542,799,000,-
60.	Bimbingan Teknis Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;	Rp.	529,900,000,-
61.	Semiloka Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan KSPN;	Rp.	141,600,000,-
62.	Belanja Keperluan sehari-hari Direktorat;	Rp.	848,040,000,-
63.	Peralatan Modal dan Mesin;	Rp.	848,040,000,-
64.	Belanja Honorarium Output Kegiatan	Rp.	233,521,000,-
65.	Sewa Gedung Perkantoran;	Rp.	2,384,662,000,-
66.	Belanja Sewa	Rp.	620.000.000,-
	Jumlah anggaran kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Rp.	328.251.389.000



Analisis Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

A. Analisis Kinerja Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah melaksanakan Indikator Kinerja dengan baik, Dengan **Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Pagu Anggaran (99.11 %)**

Sasaran I (Pertama) adalah dalam rangka terwujudnya kinerja pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 melalui kegiatan dengan hasil kinerja Pada indikator ini, hasil kerja (Realisasi) **99.11 %**

Gambar 1.a Analisis Kinerja sasaran I

NO	URAIAN	NO	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	PAGU	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			
1	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Lokasi	3	0	Rp.62.503.284.000	Rp.62.502.840.977	100%
		2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	Rp.4.700.000.000	Rp.4.224.000.000	100%
		3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	Rp.41.553.347.000	Rp.41.553.347.000	100%
		4	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	Rp.1.605.000.000	Rp.1.605.000.000	100%

Gambar 2.a Analisis Kinerja sasaran II

2	JUMLAH PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Terminal Tipe A	Laporan	3	3	Rp.19.311.825.000	Rp.19.047.810.500	98.63%
		2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana	Laporan	7	7	Rp.3.812.222.000	Rp.3.812.090.000	100%
			Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	Rp.6.321.351.000	Rp.6.321.351.000	100%
		4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	Rp.4.003.428.000	Rp.3.916.069.500	97.82%

Pada Indikator ini, hasil Kerja (Realisasi) mencapai 98.97%



- 3). Sararan III (ketiga) adalah dalam rangka terlaksananya Pengawasan Monitoring kinerja pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Gambar 3.a Analisis Kinerja **sasaran III**

3	JUMLAH DUKUNGAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	Rp.590.000.000	Rp.589.929.650	99.99%
		2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang	Kegiatan	2	2	Rp.337.909.000	Rp.337.867.650	99.99%
		3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang	Kegiatan	2	2	Rp.550.200.000	Rp.550.138.004	99.99%
		4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	Rp 1.180.286.000	Rp 1.164.662.060	99.22%

Pada Indikator ini, hasil Kerja (Realisasi) mencapai 99.99%, dan Terlaksana.

- 4). Sararan IV (Empat) adalah dalam rangka Memenuhi SDM dibidang Prasarana Transportasi Jalan yang berkualitas dan kopenten maka didakan diklat pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Gambar IV.a Analisis Kinerja **sasaran IV**

4	JUMLAH DOKUMEN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	1	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	Rp.347.200.000	Rp.346.874.800	99.91%
		2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di	Kegiatan	1	1	Rp.1.542.799.000	Rp.1.542.503.036	99.98%
		3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di	Kegiatan	1	1	Rp.417.690.000	Rp.417.585.300	99.97%
		4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	Rp.248.212.000	Rp.247.066.700	99.54%

Pada Indikator ini, hasil Kerja (Realisasi) mencapai 99.98%, dan Terlaksana.



C. USULAN PERBAIKAN

Saran agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem pelaksanaan kegiatan yaitu melalui :

- a. Perlunya perencanaan yang lebih matang dan jelas dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi;
- b. Perlunya peningkatan koordinasi di dalam internal institusi terkait dengan pelaksanaan dan perubahan rencana anggaran.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan data realisasi dari masing-masing indikator kinerja diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Pendanaan (realisasi dan efisiensi) dan Keluaran (*Output*) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang disusun berdasarkan pengelompokan sasaran sebagai berikut :

Dalam rangka terwujudnya Prasarana Transportasi Jalan yang berkeselamatan, kegiatan dengan capaian kinerja efisiensi anggaran ***Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Pagu Anggaran (99.11 %)***

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2020 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.
3. Hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan berimplikasi pada pencapaian target sasaran, untuk selanjutnya harus direduksi dengan perencanaan, penjadwalan dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.



BAB V
LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi kegiatan Per Subdit Dit Prasarana Transportasi Jalan.**
- 2. Perjanjian Kinerja Dit Prasarana Transportasi Jalan 2020**
- 3. Revisi Perjanjian Kinerja Dit Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020**
- 4. Lain-lain yang dianggap perlu**



